

BAB III
KEPENTINGAN AUSTRALIA DI CELAH TIMOR
(TIMOR LESTE)

Setiap negara pasti mempunyai kepentingan nasional, dimana negara tersebut akan memberikan prioritas tertentu pada masing-masing kepentingan yang dimiliki suatu negara berdasarkan kondisi yang dialami pada saat itu. Karena pada dasarnya kepentingan nasional terdiri dari dua elemen, yaitu pertama didasarkan pada pemenuhan kebutuhan sendiri, yang kedua mempertimbangkan atau dipengaruhi berbagai kondisi lingkungan strategi di sekitarnya. Begitupun dengan Australia yang bertindak sebagai negara pasti mempunyai kepentingan yang ingin dicapai. Untuk itu pada bab ini penulis ingin membahas tentang kepentingan nasional Australia di Celah Timor (Timor Leste).

Sementara kepentingan Australia terhadap Celah Timor (Timor Leste) akan penulis uraikan berdasarkan 3 periode waktu yaitu periode 1972-1975, periode 1989-1999, periode 2000-2005. Yang akan menjelaskan tentang kepentingan Australi terhadap Celah Timor (Timor Leste).

A. Periode 1972-1975,

1. Kepentingan Australia Melindungi Keamanan Nasional

a. Perubahan Sistem Pertahanan Australia

Sejarah Australia tidak bisa terlepas dari Inggris. Karena status Australia sebagai negara persemakmuran dari Inggris Raya yang menyebabkan ketergantungan Australia terhadap Inggris tidak dapat dipungkiri, terutama dibidang pertahanan. Namun paska perang dunia kedua telah terjadi pergeseran kebijakan Australia dimana untuk masalah pertahanan dan keamanan Australia lebih memilih Amerika Serikat sebagai payung dari segala ancaman yang dialami Australia.

Hal ini terjadi karena pada saat perang dunia kedua terjadi Inggris harus lebih memperhatikan eksistensinya di Eropa daripada harus menjaga keamanan negara-negara jajahannya di Asia Tenggara. Terlebih ketika Singapura yang merupakan negara persemakmuran Inggris jatuh ketangan Jepang, membuat Australia memikirkan kembali ketergantungannya terhadap Inggris. Karena itulah demi keamanan negara, maka Australia beralih ke Amerika Serikat yang diyakini dapat memberikan jaminan keamanan dan payung perlindungan pertahanan kepada Australia.³⁷

Namun konsekuensi dari bentuk pengabdian Australia terhadap Amerika Serikat, maka Australia harus mendukung bahkan ikut serta dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat. Misalnya

³⁷ Athiqah Nur Alami, "Kebijakan Pertahan Australia dan Respon Negara-Negara Asia Timur dan Selandia Baru" hal. 102, dalam www.google.com, diakses 19 November 2012

ketika terjadi perang dingin Amerika Serikat sedang giat untuk memerangi komunis, maka Australia harus mengikuti langkah Amerika Serikat tersebut dalam rangka menunjukkan eksistensinya terhadap Amerika Serikat sebagai sekutu dari Australia. dan ketika itu strategi pertahanan Australia dan Amerika dalam memerangi komunis cenderung menggunakan *Forward Defence Strategy*,³⁸ atau cenderung lebih ofensif (menyerang atau menekan) dalam kebijakan pertahanan Australia dan Amerika Serikat.

Namun setelah itu Australia merubah sistem pertahanannya yang semula mengikuti Amerika Serikat yang menggunakan *Forward Defence Strategy*, berubah menjadi *Self Defence Strategy*, atau lebih bertahan dan lebih lunak dalam sistem pertahanan. Hal ini dilakukan Australia karena adanya perubahan lingkungan strategis di Asia ketika itu, atau tepatnya di akhir tahun 1960-an. Perubahan inilah yang kemudian membuat Australia perlu untuk merumuskan format kebijakan pertahanan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang dan karakter bangsa Australia.³⁹

Dan akhirnya sejak pemilihan pemerintah Whitlam pada 1972, terjadi perubahan cara pandang Australia mengenai sistem pertahanan yang berkaitan dengan negara barat dan negara Asia. Whitlam sebagai perdana menteri Australia ketika itu merubah orientasi Australia dalam rangka menjaga keamanan nasional Australia. Karena Whitlam

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

menyadari bahwa ketika terjadi ketegangan di Asia maka Australia akan merasakan dampak langsung. Untuk itu orientasi Australia ketika itu lebih cenderung ke Asia terutama negara yang berbatasan langsung dengan Australia seperti Indonesia dan Timor Leste yang pada tahun 1972 masih dibawah penguasaan Portugal. Australia seolah berusaha agar hubungannya dengan kedua negara tersebut terjalin harmonis tanpa adanya gangguan. Karena Australia tidak ingin dampak perang dingin mengancam keamanan nasionalnya. Praktis Indonesia dan Timor Leste dijadikan tameng dari ancaman-ancaman peperangan yang ditimbulkan oleh perang antar dua kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Dan apa yang telah dilakukan Australia terhadap Indonesia dan Timor Leste yang masih dibawah kekuasaan Portugal pada tahun 1972 berusaha menjaga hubungan baik, sesuai dengan sistem pertahanan yang telah diterapkan di negara tersebut. Yaitu *Self Defence Strategy*. Yang merupakan sistem yang lunak dalam pertahanan.

**b. Kepentingan Australia Melindungi Keamanan Nasional
Dari Ancaman Komunis di Pulau Timor**

Keamanan nasional merupakan salah satu kepentingan yang akan menjadi prioritas besar bagi negara untuk mewujudkan keamanan bagi negaranya. Karena rasa aman dibutuhkan oleh semua warga negara dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Karena jika rasa aman tidak didapatkan oleh semua warga atau masyarakat di suatu negara,

maka segala kegiatan di negara tersebut akan lumpuh. Baik kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, politik serta kegiatan pendidikan. Untuk itu masalah keamanan nasional akan mendapatkan perhatian yang besar dari negara.

Persepsi suatu bangsa tentang keamanannya dibentuk oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Yang menonjol di antara faktor-faktor internal, di samping faktor geopolitik, yaitu luas wilayah dan besar penduduknya serta kekayaan alam dan posisi geografis, yang lebih-kurang bersifat konstan, adalah latar-belakang dan pengalaman sejarahnya. Pada gilirannya, faktor-faktor internal ini sebagian menentukan persepsi atau pandangan bangsa itu tentang dunia luar, yang sifatnya subjektif. Ini merupakan salah satu faktor eksternal dan membantu menentukan kebijakan keamanan dan politik luar negerinya. Dalam hubungan internasional yang didominasi oleh nagara-negara bangsa, sebagai aktor negara-negara bangsa itu bukan saja berindak sebagai subjek, tetapi juga sebagai objek kebijakan negara-negara bangsa lain. Sebab itu, walaupun politik luar negeri sering dikatakan pada dasarnya sebagai lanjutan politik dalam negeri, sampai taraf tertentu politik luar negeri juga merupakan reaksi terhadap politik luar negeri negara-negara lain.⁴⁰

⁴⁰ Soedjati Djiwandono, "Konsep-Konsep Keamanan : Pengalaman Indonesia", dalam http://www.unisosdem.org/kumtul_detail.php?aid=404&coid=1&caid=34&auid=2 diakses 13 oktober 2012

Sementara itu, realitas yang telah senantiasa menandai hubungan internasional dari jaman ke jaman adalah bahwa ciri hubungan antar bangsa, yang membentuk sistem politik internasional, hampir selalu ditentukan terutama oleh negara-negara besar, bagaimana pun definisinya. Dan dalam hubungan internasional kontemporer, terutama untuk Asia-Pasifik, secara tradisional negara-negara besar itu adalah Amerika Serikat, Russia (pewaris Uni Soviet dalam Perang Dingin), RRC, dan Jepang, sedang India dan Indonesia, misalnya, mungkin dapat digolongkan sebagai negara-negara besar potensial untuk masa depan, sekurang-kurangnya dari segi luas wilayah dan jumlah penduduknya. Kepentingan dan kebijakan negara-negara besar itu menentukan pola hubungan dan interaksi antar negara di kawasan Asia-Pasifik.⁴¹

Itu artinya kebijakan tentang keamanan Australia di era 1970-an dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu terjadinya ketidakstabilan di banyak kawasan dan negara yang disebabkan oleh terjadinya perang dingin.

Pada era perang dingin, dunia seolah diancam oleh rasa ketidakamanan yang kapan saja bisa merusak kedamaian yang di jalani masyarakat dunia. Perang Dingin adalah sebutan bagi sebuah periode di mana terjadi konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Amerika Serikat (beserta sekutunya disebut *Blok Barat*) dan Uni Soviet (beserta sekutunya disebut *Blok Timur*) yang terjadi antara tahun 1947—1991.

⁴¹ *Ibid*

Persaingan keduanya terjadi di berbagai bidang: koalisi militer; ideologi, psikologi, dan tilik sandi; militer, industri, dan pengembangan teknologi; pertahanan; perlombaan nuklir dan persenjataan; dan banyak lagi. Ditakutkan bahwa perang ini akan berakhir dengan perang nuklir, yang akhirnya tidak terjadi. Istilah "Perang Dingin" sendiri diperkenalkan pada tahun 1947 oleh Bernard Baruch dan Walter Lippman dari Amerika Serikat untuk menggambarkan hubungan yang terjadi di antara kedua negara adikuasa tersebut. Setelah AS dan Uni Soviet bersekutu dan berhasil menghancurkan Jerman Nazi, kedua belah pihak berbeda pendapat tentang bagaimana cara yang tepat untuk membangun Eropa pasca perang. Selama beberapa dekade selanjutnya, persaingan di antara keduanya menyebar ke luar Eropa dan merambah ke seluruh dunia ketika AS membangun "pertahanan" terhadap komunisme yang disebarkan Uni Soviet dengan membentuk sejumlah aliansi dengan berbagai negara, terutama dengan negara di Eropa Barat, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.⁴²

Di saat perang dingin berlangsung tepatnya pada tahun 1970-an tentunya negara-negara di Asia tenggara dan juga Australia menginginkan perdamaian dan cenderung ingin menghindari dampak peperangan yang disebabkan perang dingin. Terlebih ketika itu negara-negara di Asia tenggara dan juga Australia berada di tengah ancaman

⁴² "Perang Dingin", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dingin diakses 11 oktober 2012

Komunis yang semakin kuat di Vietnam, Laos dan Kamboja sudah tentu memerlukan upaya yang luar biasa agar tujuan tersebut dapat terwujud.⁴³

Australia ketika itu merupakan salah satu aliansi dari blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Australia begitu dekat dengan negara barat karena Australia dulunya sebelum tahun 1986 merupakan negara persemakmuran dari Inggris Raya, untuk itu wajar jika Australia begitu dekat dengan negara-negara barat meskipun secara geografis letak Australia lebih dekat dengan Asia. Kedekatan Australia dengan negara-negara barat ini membuat semua kebijakan yang diambil Australia seolah berkiblat pada kepentingan negara-negara barat.

Namun sejak pemilihan pemerintah Whitlam pada 1972 terjadi perubahan pada orientasi politik luar negeri Australia. Gough Whitlam menggunakan jabatan perdana menteri secara penuh. Dia menuntut "antisipasi perubahan cerdas", yang akan mengikuti penerimaan dunia internasional atas Cina pada tahun 1972, penarikan pasukan asing dari Vietnam, dan multipolaritas menggantikan bipolaritas Perang Dingin. Dia mengubah fokus Australia ke Asia.⁴⁴

Sejak itulah kepentingan Australia atas Timor Leste dan Indonesia menjadi prioritas. Di tahun 1970an kepentingan Australia adalah tentang mendapatkan rasa aman dari ancaman yang disebabkan

⁴³ Bambang Cipto, *HUBUNGAN INTERNASIONAL DI ASIA TENGGARA*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hal. 38

⁴⁴ Garry Woodard, "Whitlam turned focus on to Asia", 2005, dalam <http://www.theage.com.au/news/opinion/whitlam-turned-focus-on-to-asia> diakses 11 oktober 2012

perang dingin. Kepentingan politik Australia yang paling kentara terhadap Timor Leste pertama-tama adalah menghindari tidak melebarnya konflik di Timor Leste pada masa tahun 1970-an itu menjadi ancaman bagi wilayah Australia. Negeri Kangguru menghendaki Timor Leste stabil sehingga hubungan politik RI-Australia tidak terganggu.⁴⁵

Australia tidak menginginkan jika terjadi ketidakstabilan pada negara-negara yang dijadikan benteng untuk membendung ancaman perang dari dampak perang dingin yaitu Indonesia dan Timor Leste. Karena jika hal itu terjadi maka berarti Australia membiarkan gerbang menuju peperangan antara pihak Komunis (blok Timor) dan pihak Liberal (blok barat) terjadi di kawasan yang sangat dekat dengan Australia terutama Timor Leste yang ketika itu sudah terjadi konflik intern. Dan hal itu akan membawa Australia kepada situasi yang sangat tidak menguntungkan, karena mau tidak mau Australia akan terseret pada peperangan yang terjadi. Terlebih Australia merupakan aliansi dari blok barat yang dipimpin Amerika Serikat yang mengusung anti Komunisme. Dan itu membuat Australia harus menunjukkan eksistensinya dalam memerangi komunisme jika sudah menyebar di kawasan yang dekat dengan Australia.

⁴⁵ Asep Setiawan, "Kepentingan Australia di Timor Timur", 2006, dalam <http://globalisasi.wordpress.com/2006/07/10/kepentingan-australia-di-timor-timur/> diakses 9 oktober 2012

Dan dapat dilihat dari situasi itu Australia pada tahun 1970an fokus terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri yang berhubungan dengan keamanan nasional Australia terutama kebijakan yang berkaitan dengan negara tetangganya yang bebatasan langsung yaitu Indonesia dan Timor Leste yang menjadi benteng langsung dari menyebarnya komunis dan melusnya konflik.

B. Periode 1989-1999,

1. Kepentingan Australia Untuk Mengeksplorasi Minyak dan Gas di Celah Timor

a. Kepentingan Australia Untuk Mengeksplorasi Minyak dan Gas di Celah Timor Melalui Kesepakatan Celah Timor

Fokus Australia terhadap keamanan nasional pada tahun 1970an yang berkaitan dengan Timor Leste mulai berkurang dengan keadan Perang Dingin yang mulai berakhir pada tahun 1980-an ketika Pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev meluncurkan program reformasi, perestroika dan glasnost. Secara konstan, Uni Soviet kehilangan kekuatan dan kekuasaannya terhadap Eropa Timur dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1991. Dengan mulai berakhirnya perang dingin menandakan bahwa ancaman peperangan antara negara-negara yang menganut Komunis dan Liberal juga mulai berkurang. Dan tatanan hubungan internasional mulai stabil, begitupun keadaan di kawasan Asia tenggara yang selama perang dingin berlangsung terutama di tahun 1970-an

membuat Australia khawatir akan serangan komunis yang sempat berkembang di Timor Leste yang berbatasan langsung dengan Australia.

Dengan mulai stabilnya kawasan Asia membuat fokus Australia berubah kepada kepentingan ekonomi, terlebih pada tahun akhir 1980-an hingga akhir tahun 1990-an dimana isu tentang ladang minyak yang bernilai milliaran dollar Amerika Serikat yang terkandung di laut Timor atau Celah Timor semakin terdengar santer dimana ketika itu Timor Leste sudah masuk kedalam wilayah Indonesia berkat dukungan negara-negara barat termasuk Australia.

Sejak orientasi Australia berubah terhadap Celah Timor (Timor Leste), yaitu dari yang semula kepentingan keamanan berubah menjadi kepentingan ekonomi, dimana Australia ingin menguasai minyak dan gas di Celah Timor. Dan sejak itu maka kebijakan Australia yang berhubungan dengan Celah Timor (Timor Leste) dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ekonomi. Karena ilmu ekonomi sendiri berorientasi kuat terhadap kebijaksanaan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu ilmu ekonomi dikenal sebagai ilmu sosial yang sangat *planning-oriented*, pengaruh mana meluas pada ilmu politik sebagaimana pengertian pembangunan ekonomi telah mempengaruhi pengertian pembangunan politik. Oleh karena pilihan-pilihan tentang kebijaksanaan yang harus ditempuh seringkali terbatas sekali adanya.⁴⁶ Untuk itu

⁴⁶ Miriam Budiardjo, *DASAR-DASAR ILMU POLITIK*, Jakarta, PT. Gramedia, 1977, hal. 23.

keterkaitan yang begitu erat antara ekonomi dan politik, membuat kebijakan yang diambil Australia berubah ketika kepentingan ekonomi menjadi orientasi negara tersebut.

Akhirnya Australia berniat untuk menuntut Indonesia agar segera menyelesaikan perundingan yang dilakukan sejak tahun 1975 tentang status batas Celah Timor, setelah Indonesia menganeksasi Timor Leste dengan dukungan dari Australia. Perundingan tersebut sudah lama tidak terselesaikan karena isu yang berkembang di tahun 1970-an di Australia adalah isu keamanan, sehingga Australia baru bisa menuntut kembali perundingan pada akhir 1980-an yang sebelumnya sempat tertunda tersebut, setelah kondisi internasional cenderung stabil ketika perang dingin mulai berakhir. Pada tahun 1989, setelah 11 tahun perundingan, Australia dan Indonesia menandatangani Perjanjian Celah Timor, yang menandakan dukungan formal Australia klaim Jakarta atas Timor Timur, sementara tidak ada negara lain di Barat yang mengakui kedaulatan de jure Indonesia atas wilayah tersebut.⁴⁷

Dengan berpegangan pada hasil perundingan yang dilakukan Australia dengan Indonesia yang menghasilkan kesepakatan Celah Timor, maka Australia mendapatkan hak yang legal untuk melakukan

⁴⁷ Rephoyt, " *Celah Timor atau Timor GAP. Sebuah Pandangan*", dalam <http://rephoyt.blogspot.com/2011/09/celah-timor-atau-timor-gap-sebuah.html> diakses 26 september 2012.

eksploitasi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi di perairan Celah Timor.

b. Eksplorasi Minyak di Celah Timor Oleh Australia

Dengan adanya kandungan minyak dan gas yang luar biasa di dasar laut Celah Timor, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan bagi sebuah negara. Selain menguntungkan negara kondisi kekayaan minyak yang melimpah juga akan menguntungkan perusahaan pertambangan minyak baik milik negara ataupun swasta. Dan jika ladang minyak yang ada ditangani swasta, maka negara yang memiliki wilayah yang mengandung minyak tersebut akan tetap mendapat keuntungan dari pengeksplorasian minyak yang dilakukan oleh pihak swasta. Untuk itu Australia sangat tertarik dengan Celah Timor untuk dijadikan wilayah pengeksplorasian minyak guna mengeruk keuntungan. minyak yang ada di dalam wilayah Timor Lorosa'e baru ditemukan pada awal 1994 dan disarikan pada 1998 dari ladang minyak Elang-Kakatua.⁴⁸

Dan untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa maka Australia mempercayakan pengeksplorasian Minyak di Celah Timor kepada perusahaan-perusahaan minyak swasta asal Australia. dengan demikian Australia mendapat keuntungan ganda yaitu berupa pendapatan materiil dari royalti dan pajak serta Australia diuntungkan dengan terserapnya ribuan tenaga kerja asal Australia dalam proses

⁴⁸ Buletin La'o Hamutuk, "Latar Belakang Sejarah Laut Timor", Vol. 4, Nos. 3-4 Agustus 2003 hal. 2

pengeplorasian yang ditangani perusahaan-perusahaan asal negara tersebut. Dan berikut ini adalah daftar ladang minyak serta perusahaan yang beroperasi di Celah Timor.

Gambar 4. Daftar Perusahaan Minyak Yang Beroperasi di Celah Timor

Nama Ladang Minyak	Perusahaan Yang Beroperasi	Asal Perusahaan
Elang-Kakatua	1. Conoco Phillips	1. Australia
Bayu-Undan	1. Conoco Phillips	1. Australia
Greater Sunrise	1. Woodside Australian Energy 2. Royal Dutch Shell 3. Osaka gas	1. Australia 2. Belanda 3. Jepang
Ladang minyak Laminaria-Corallina	1. Woodside 2. Shell 3. BHP Billiton	1. Australia 2. Amerika Serikat (anak perusahaan dari Royal Dutch Shell) 3. Australia

Dari daftar ladang minyak serta perusahaan yang beroperasi di Celah Timor diatas, maka kita dapat mengetahui bahwa mayoritas perusahaan yang beroperasi di Celah Timor merupakan perusahaan minyak yang berasal dari Australia. walaupun ada perusahaan dari luar Australia seperti Royal Dutch Shell dan Osaka gas yang beroperasi di ladang minyak Greater Sunrise, maka perusahaan tersebut hanya sebagai pihak yang diajak kerjasama. Namun operasi penuh berada di tangan

perusahaan Woodside Australian Energy, yang merupakan perusahaan pertambangan minyak asal Australia.

Dengan banyaknya perusahaan pertambangan minyak asal Australia yang beroperasi di Celah Timor semakin mengindikasikan bahwa kepentingan ekonomi Australia untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Celah Timor tidak dapat dipungkiri.

2. Kepentingan Australia Untuk Mempunyai Peran di Kawasan Asia

a. Kepentingan Australia Untuk Mempunyai Peran Sebagai “Sheriff” Dalam Menjaga Keamanan di Kawasan Asia (Middle Power)

Dunia internasional banyak yang menganggap bahwa tindakan invasi Indonesia terhadap Timor Leste pada tahun 1975 merupakan suatu tindakan yang ilegal. Terlebih lagi banyak korban jiwa yang meninggal dalam proses invasi yang menggunakan nama operasi seroja dalam pelaksanaannya tersebut. Banyak negara termanuk PBB selalu menuntut Indonesia untuk memberikan kemerdekaan terhadap Timor Leste. Terlebih lagi setelah terjadi peristiwa yang disebut dengan insiden Santa Cruz yang terjadi pada tahun 1992.

Insiden Santa Cruz (juga dikenal sebagai Pembantaian Santa Cruz) adalah penembakan pemrotes Timor Timur di kuburan Santa Cruz di ibu kota Dili pada 12 November 1991. Para pemrotes, kebanyakan mahasiswa, mengadakan aksi protes mereka terhadap pemerintahan

Indonesia pada penguburan rekan mereka, Sebastião Gomes, yang ditembak mati oleh pasukan Indonesia sebulan sebelumnya. Para mahasiswa telah mengantisipasi kedatangan delegasi parlemen dari Portugal, yang masih diakui oleh PBB secara legal sebagai penguasa administrasi Timor Timur. Rencana ini dibatalkan setelah Jakarta keberatan karena hadirnya Jill Joleffe sebagai anggota delegasi itu. Joleffe adalah seorang wartawan Australia yang dipandang mendukung gerakan kemerdekaan Fretilin. Dalam prosesi pemakaman, para mahasiswa menggelar spanduk untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, menampilkan gambar pemimpin kemerdekaan Xanana Gusmao. Pada saat prosesi tersebut memasuki kuburan, pasukan Indonesia mulai menembak. Dari orang-orang yang berdemonstrasi di kuburan, 271 tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang. Salah satu yang meninggal adalah seorang warga Selandia Baru, Kamal Bamadhaj, seorang pelajar ilmu politik dan aktivis HAM berbasis di Australia. Pembantaian ini disaksikan oleh dua jurnalis Amerika Serikat; Amy Goodman dan Allan Nairn; dan terekam dalam pita video oleh Max Stahl, yang diam-diam membuat rekaman untuk Yorkshire Television di Britania Raya. Para juru kamera berhasil menyelundupkan pita video tersebut ke Australia. Mereka memberikannya kepada seorang wanita Belanda untuk menghindari penangkapan dan penyitaan oleh pihak berwenang Australia, yang telah diinformasikan oleh pihak Indonesia dan melakukan pengeledahan bugil terhadap para juru kamera itu ketika

mereka tiba di Darwin. Video tersebut digunakan dalam dokumenter *First Tuesday* berjudul *In Cold Blood: The Massacre of East Timor*, ditayangkan di ITV di Britania pada Januari 1992. Tayangan tersebut kemudian disiarkan ke seluruh dunia, hingga sangat mempermalukan pemerintahan Indonesia. Di Portugal dan Australia, yang keduanya memiliki komunitas Timor Timur yang cukup besar, terjadi protes keras. Banyak rakyat Portugal yang menyesali keputusan pemerintah mereka yang praktis telah meninggalkan bekas koloni mereka pada 1975. Mereka terharu oleh siaran yang melukiskan orang-orang yang berseru-seru dan berdoa dalam bahasa Portugis. Demikian pula, banyak orang Australia yang merasa malu karena dukungan pemerintah mereka terhadap rezim Soeharto yang menindas di Indonesia, dan apa yang mereka lihat sebagai pengkhianatan bagi bangsa Timor Timur yang pernah berjuang bersama pasukan Australia melawan Jepang pada Perang Dunia II.⁴⁹

Setelah peristiwa tersebut tekanan datang begitu deras dari dunia internasional terhadap Indonesia untuk memberikan kemerdekaan terhadap Timor Leste serta bertanggung jawab atas insiden Santa Cruz yang menewaskan ratusan orang di Timor Leste.

⁴⁹ Devania Annesya, *Insiden Santa*, dalam <http://frenndw.wordpress.com/tag/timor-timur/> diakses 13 oktober 2012

Dengan keadaan yang seperti itu Australia seolah ikut merasa bertanggung jawab, karena telah memberikan dukungan terhadap Indonesia ketika melakukan invasi terhadap Timor Leste pada tahun 1975. Semenjak itu Australia ingin membalas kesalahan masa lalu dengan memberikan dukungan terhadap Timor Leste untuk mendapatkan kemerdekaan dari Indonesia.

Dengan memberikan dukungan terhadap Timor Leste maka kepentingan Australia selain menebus kesalahan masa lalu juga mempunyai kepentingan lain. Kepentingan tersebut adalah melakukan unjuk kekuatan politik atas Timor Leste. Dengan intervensi militer ke Timor Leste, Australia mengirim pesan kepada Jakarta tentang kemampuan diplomatiknya yang berskala global. Dengan pendekatan kepada Amerika Serikat dan Eropa, Australia dapat menggolkan rencananya untuk memaksa masuk ke Timor Leste di bawah payung PBB. Sikap Australia paling akhir ini dapat dilihat dari "Doktrin Howard" yang kemudian direvisi sendiri. Menurut Ismet Fanany dalam tulisannya Doktrin Howard dalam Konteks Sejarah, doktrin itu merupakan pedoman politik luar negeri Australia. Howard menjelaskan doktrinnya dalam wawancara dengan Fred Brenchley dalam majalah *The Bulletin* edisi 28 September 1999. Doktrin ini adalah politik regional yang bersandar pada pandangan politik internasional Australia yang ingin menjadi wakil atau 'deputy' penjaga keamanan dan perdamaian di kawasan ini. Yang dinobatkan sebagai 'ketua'-nya adalah Amerika

Serikat. Dengan demikian, sasarannya adalah negara-negara Asia, termasuk Indonesia tentunya. Inti dan dasar pemikiran Doktrin Howard ini telah mengundang, berbagai reaksi dari kawasan Asia dan di Australia sendiri. Di antara inti dan dasar pemikiran tersebut;

a) Australia adalah bangsa Eropa yang karenanya punya *special characteristics* dan *occupies a special place* di kawasan Asia; ciri istimewa dan memiliki tempat istimewa ini dihubungkan Howard dengan 'nilai' yang dimiliki Australia yang harus dipertahankan dan dipromosikan di kawasan ini;

b) untuk menjamin kehidupan nilai yang menjadi pedoman benar/salah dalam kebijakan dan perilaku kebijakan luar negerinya di kawasan ini, Howard menunjuk Australia sebagai wakil Amerika Serikat dalam peranannya sebagai "polisi" internasional di kawasan ini.⁵⁰

Australia seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kemampuan militer serta kekuatan politik yang dimiliki patut untuk diperhitungkan dalam percaturan internasional. Australia ingin dianggap sebagai sekutu Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Dan untuk itu Australia perlu dipandang sebagai negara yang besar, terutama dikawasan Asia.

⁵⁰ Asep Setiawan, "Kepentingan Australia di Timor-Timur", dalam <http://globalisasi.wordpress.com/2006/07/10/kepentingan-australia-di-timor-timur/> diakses 9 oktober 2012

b. Perubahan Kebijakan Pertahanan Australia

Selama perang dingin berlangsung, yang telah menyeret Australia pada suatu keadaan yang mengancam keamanan nasional yang bisa datang sewaktu-waktu. Terlebih Australia telah terlibat langsung dalam peperangan yang muncul akibat perang dingin. Misalnya keterlibatan Australia pada perang Vietnam. Keterlibatan itu merupakan bentuk eksistensi dari Australia sebagai negara sekutu dari Amerika Serikat.

Dengan terlibatnya Australia dalam perang Vietnam, memberikan pelajaran bagi negara tersebut betapa ancaman komunis dan ancaman ketidakstabilan kawasan yang ditimbulkan perang dingin kapan saja bisa mengancam Australia. dan jika hal itu terjadi kerugian luar biasa akan dialami Australia. dan Australia semenjak menjadi sekutu dari Amerika Serikat seolah-olah Australia ingin menunjukkan bahwa Australia merupakan "deputy sheriff" yang merupakan wakil dari Amerika Serikat dalam menjaga keamanan dikawasan Asia. Terutama setelah Amerika Serikat memenangkan perang dingin dengan ditandainya keruntuhan Uni Soviet.

Dan untuk mendukung keinginan Australia untuk mencapai keinginan untuk menjadi wakil Amerika Serikat dalam menjaga keamanan kawasan Asia, maka sejak tahun 1970-an Australia suda mulai meningkatkan anggaran pertahanan militer mereka. Terutama setelah Uni Soviet melakukan invasi terhadap Afghanistan pada tahun 1979. Selain

untuk mengantisipasi ancaman komunis, Australia meningkatkan anggaran pertahanan untuk menjadi wakil Amerika Serikat untuk menjadi pengaman kawasan Asia.

Oleh karena itu Perdana Menteri Malcolm Fraser menanggapi dengan revisi pertahanan yang memaksa peningkatan tahunan sebesar 6%. Artinya Australia harus meningkatkan anggaran pertahanan sebesar enam persen tiap tahunnya. Dan peningkatan anggaran pertahanan tersebut baru dapat terwujud mulai tahun 1987. Dan itupun peningkatan anggaran pertahanan Australia hanya menyentuh angka 3% dari sebelumnya.⁵¹

Itu artinya sejak tahun 1987 anggaran pertahanan Australia selalu naik 3% tiap tahunnya. Hingga di tahun 1990-an ketika perang dingin mulai berakhir yang menyebabkan keamanan global tidak lagi terancam peperangan seperti tahun-tahun sebelumnya ketika perang dingin masih berlangsung. Namun dengan lebih stabilnya keamanan global tidak membuat Australia berhenti meningkatkan anggaran keamanan negara. Meskipun Australia menurunkan angka peningkatan anggaran keamanan yang semula 3% tiap tahun menjadi 2,8% tiap tahun.⁵²

⁵¹ Derek Woolner, "Pertahanan anggaran: Beberapa perspektif sejarah", dalam <http://www.lowyinterpreter.org/post/2012/11/20/Defence-budgets.aspx> diakses 20 November 2012

⁵² *Ibid*

Meskipun Australia menurunkan angka persentasi peningkatan anggaran pertahanan pada tahun 1990-an dimana ketika itu keadaan keamanan global sudah stabil dengan berakhirnya perang dingin, namun dengan peningkatan anggaran sebesar 2,8% tiap tahun sejak tahun 1990 maka sudah cukup membuktikan bahwa Australia ingin menjadi negara yang memiliki kekuatan militer yang diperhitungkan dunia untuk menjadi “deputy sheriff” atau wakil dari Amerika Serikat untuk menjaga keamanan di kawasan Asia.

C. Periode 2000-2005,

1. Kepentingan Australia Untuk Mengeksplorasi Minyak dan Gas di Celah Timor Melalui Kesepakatan Laut Timor

Timor Leste memperjuangkan kemerdekaannya atas Indonesia dengan harapan setelah merdeka mereka bisa memanfaatkan kekeayaan alam yang mereka miliki secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat Timor Leste. Karena sebagai negara baru tentu saja perekonomian yang berjalan sesaat setelah merdeka dari Indonesia belum bisa menjalankan roda perekonomian yang layak untuk sebuah negara. Dengan kandungan minyak dan gas yang diperkirakan bernilai puluhan miliar dollar Amerika Serikat yang ada di Celah Timor membuat Timor Leste terbuai akan mimpi menjadi sebuah negara yang makmur setelah merdeka dari Indonesia.

Timor Leste yakin dengan hal tersebut karena berdasarkan hukum penentuan batas wilayah laut yang berdasarkan (ZEE) Zona

Ekonomi Eksklusif, wilayah Celah Timor Masuk ke dalam wilayah Timor Leste. ZEE sendiri yaitu suatu wilayah laut dan dasar laut yang menghubungkan darat dari suatu negara di mana negara tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi dan menjual kekayaan yang ada di dalamnya. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB, zona ekonomi eksklusif biasanya meliputi 200 mil nautik (370 km) dari pantai. Bila dua negara tetangga memiliki jarak kurang dari 400 mil, suatu proses negosiasi dan/atau arbitrase dapat memutuskan batas antara zona ekonomi eksklusif, yang biasanya terdapat di sepanjang garis tengah.⁵³ Dengan berpegang pada hukum PBB tersebut Timor Leste yakin akan mendapatkan hasil yang maksimal dari ladang minyak Celah Timor.

Konvensi Hukum Laut tahun 1982 telah memperkuat posisi Timor Leste karena semakin tegas ditetapkan bahwa bahwa batas landas kontinen ditetapkan minimal 200 mil laut. Dengan berpegang pada ketentuan ini maka adalah “adil” jika dalam penetapan ditentukan dengan garis tengah. Karena jika dilihat Celah Timor lebih dekat ke Timor Leste daripada ke Australia.⁵⁴

Namun ternyata mimpi tersebut harus dikubur terlebih dahulu setelah mengetahui bahwa ternyata Australia berusaha mempertahankan haknya atas eksplorasi minyak di Celah Timor sesuai dengan hak yang didapatkan ketika Australia dan Indonesia sepakat membagi Celah Timor

⁵³“Daftar Istilah Minyak Dan Gas”, Buletin Lao Hamutuk, vol 4, no 3-4, Agustus 2003, hal 13.

⁵⁴ Tulus Warsito, *DIPLOMASI PERBATASAN*, Yogyakarta, LP3 UMY, 2009, hal. 83

menjadi area eksplorasi bersama. Karena pada tahun 1989 Australia dan Indonesia menyepakati sebuah perjanjian yang disebut kesepakatan Celah Timor yang memberikan akses bagi Australia untuk melakukan eksplorasi di wilayah Celah Timor. Dan dengan kecerdikan Australia maka paska kemerdekaan Timor Leste, Australia mendekati UNTAET sebagai pemerintah utusan PBB yang sah paska kemerdekaan Timor Leste, untuk berunding guna mencapai kepentingan Australia untuk mempertahankan kesepakatan Celah Timor. Selain itu langkah Australia tersebut didasari pada pemahamannya bahwa wilayah Celah Timor merupakan wilayah kepanjangan alamiah yang dimiliki Australia.

Pemahaman tersebut merujuk pada pasal 1 konvensi hukum laut di Jenewa tahun 1958 yang berbunyi “Dasar laut dan tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai tetapi diluar daerah teritorial, sampai pada kedalaman 200 meter atau lebih, sepanjang dalamnya air laut di atasnya masih memungkinkan untuk dapat mengeksplorasinya dan mengeksploitasi sumber-sumber daya alamnya. Termasuk pula dalam pengertian landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar area laut teritorial dari sebuah pulau.⁵⁵ Dengan hukum yang sudah tidak berlaku tersebut Australia berpendapat bahwa kedalaman Celah Timor yang kurang dari 200 meter merupakan daerah kepanjangan alamiahnya.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 80

Kesepakatan UNTAET-Australia pertama dibuat pada tahun 2000 dimana perundingan itu bertujuan untuk melanjutkan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam kesepakatan Celah Timor pada tahun 1989 antara Indonesia dan Australia, tetapi hanya menggantikan Indonesia dengan Timor Leste dalam seluruh draf naskah itu. Pembagian pendapatan 50:50 dari daerah kerjasama area A (yang sekarang disebut wilayah pengembangan minyak bersama) tetap berlaku.

Dengan langkah tersebut maka menunjukkan bahwa Kepentingan Australia jelas ingin tetap mempertahankan kesepakatan Celah Timor yang disepakatinya dengan Indonesia yang memberi hak legal terhadap Australia untuk melakukan eksplorasi minyak di Celah Timor.

Dan demi kepentingannya tersebut Australia bahkan tidak menghiraukan hukum internasional yang ditetapkan PBB tentang batas laut tahun 1982. Australia tidak sependapat dengan hukum yang dijadikan acuan Timor Leste untuk memperjuangkan haknya tersebut. Dimana dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982, masalah landas kontinen mendapat tempat pengaturan tersendiri yakni dalam bab VI pasal 76-85. Dalam Konvensi ini batas luar dari landas kontinen sudah cukup tegas dan jelas. Berarti sudah ada kepastian hukum tentang sejauh mana suatu negara memiliki hak eksklusif atas sumber daya alam dari landas kontinen tersebut.⁵⁶ Hal itu menunjukkan bahwa prinsip hukum

⁵⁶ | Wayan Parthiana SH.MH, "Pengantar Hukum Internasional", CV Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 132, dikutip oleh Tulus Warsito, *DIPLOMASI PERBATASAN*, Yogyakarta, LP3 UMY, 2009, hal. 81

yang digunakan oleh Australia sudah tidak relevan karena sudah diperbaharui dengan hukum yang baru.

Selain itu Australia tidak menganggap pendapat para ahli geologi yang menyatakan bahwa kepanjangan alamiah landas koninen Australia justru terletak disebelah utara pulau Timor. Australia memilih untuk tidak mau menerima ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, meskipun sudah menandatangani Konvensi tersebut.⁵⁷

Semua langkah yang diambil Australia tersebut jelas menunjukkan keinginannya untuk mencapai kepentingan guna mempertahankan kesepakatan Celah Timor yang disepakati dengan Indonesia, supaya Australia tidak kehilangan hak untuk melakukan pengeksplorasian minyak di Celah Timor.

⁵⁷ Tulus Warsito, *op cit.*, hal 84